

TATA KELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PADA SEKTOR PARIWISATA: STUDI WISATA DIENG

Valeriana Aldiva Fitriani – 14010120120024

Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan FISIP

Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia

ABSTRAK

Keselamatan dan keamanan wisata merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pada umumnya, wisata yang memiliki risiko tinggi memiliki daya tarik lebih bagi wisatawan. Wisata Dieng yang berada di dataran tinggi dan daerah gunung api memerlukan manajemen risiko terstruktur. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin muncul dari segala potensi risiko. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami tata kelola dalam keselamatan dan keamanan destinasi Wisata Dieng. Hal ini tidak hanya merujuk pada keselamatan wisatawan, tapi memandang lebih jauh dari perspektif pengelola hingga pengendali kebijakan. Setiap perspektif mesti dianalisis lebih dalam untuk melihat seberapa bekerjanya tolak ukur hingga legal standing yang dipakai dalam tata kelola keselamatan dan keamanan Wisata Dieng. Data diperoleh dari wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi utuh, jelas dan lengkap kepada aktor-aktor pengelola Wisata Dieng. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keselamatan dan keamanan Wisata Dieng diselenggarakan dengan mengidentifikasi risiko, menyusun prosedur, menciptakan respon tanggap darurat dalam penanganan kecelakaan, memberlakukan aturan, menggandeng media untuk menyebarluaskan informasi aktual, dan menyusun pemulihan pasca terjadinya bencana atau kecelakaan.

Kata kunci: Keselamatan dan keamanan, Manajemen risiko, Wisata

ABSTRACT

Tourism safety and security is a right that must be fulfilled by the government and regional governments. In general, tourism that has a high risk has more attraction for tourists. Dieng tourism, which is located in the highlands and volcanic areas, requires structured risk management. Risk management aims to minimize the negative impacts that may arise from all potential risks. Therefore, this research will explore governance in the safety and security of the Dieng tourist destination. This does not only refer to tourist safety, but looks further from the perspective of managers to policy controllers. Each perspective must be analyzed more deeply to see how well the benchmarks work legal standing which is used in managing the safety and security of Dieng Tourism. Data was obtained from in-depth interviews to collect complete, clear and complete information for the actors managing Dieng Tourism.

The results of this research are that Dieng Tourism safety and security management is carried out by identifying risks, developing procedures, creating emergency responses in handling accidents, enforcing rules, collaborating with the media to disseminate actual information, and organizing recovery after a disaster or accident.

Keywords: Safety and security, Risk management, Tourism

Setiap orang berhak memenuhi kebutuhannya untuk berwisata. Artinya berwisata termasuk dalam hak asasi manusia, dimana kegiatan ini identik dengan mobilitas manusia dari tempat ke tempat yang bertujuan untuk mencari kesenangan. Hal ini tertuang dalam pasal 13 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak setiap orang untuk bergerak dan berpindah melewati batas-batas wilayah negara, serta pasal 24 yang mengatur tentang hak setiap orang atas istirahat dan hari libur termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala dengan tetap menerima upah (Laheri, 2015). Sejalan dengan peraturan tersebut, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diterapkan dalam hak berwisata, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab. Konsekuensi dari prinsip tersebut memunculkan tiga bentuk kewajiban yang harus dilakukan, yakni kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.

Berdasarkan pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kewajiban-kewajiban di atas dibebankan kepada negara. Kemudian diwujudkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban pemerintah dan

pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepariwisataan, menyelenggarakan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan wisatawan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan agar terhindar dari dampak negatif yang menysasar masyarakat luas. Dalam kata lain, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kepariwisataan sudah sesuai dengan standar keselamatan dan keaman yang telah ditentukan.

Namun, jarang ditemui destinasi wisata yang optimal dalam melakukan tata kelola dalam urusan keselamatan dan keamanan pada destinasi wisata. Berbagai macam legal standing yang diputuskan pemerintah tidak menjadi jaminan dalam pengoptimalan pelaksanaan tata kelola keselamatan dan keamanan dalam sektor destinasi wisata. Hal ini mengindikasikan kekurangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban yang dapat berdampak bisa merugikan wisatawan, baik secara materiil maupun imateriil. Peristiwa tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap hak berwisata sebagai hak asasi manusia. Namun sayangnya, belum ada konsekuensi yuridis

bagi negara terhadap praktik pelanggaran tersebut sehingga wisatawan yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi karena tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab. Meskipun secara konseptual, wisatawan dapat menuntut negara atas kerugian yang dialami sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan sangat bertele-tele dan memakan waktu. Apalagi, mereka dapat berdalih bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian wisatawan sendiri.

Kondisi geografis Indonesia justru memunculkan keunikan bentang alam yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Maka dari itu, hampir seluruh destinasi wisata di Indonesia berada di daerah rawan bencana sehingga menuntut kecakapan wisatawan untuk menjaga keselamatan dan keamanan diri di samping jaminan keselamatan dan keamanan oleh negara. Dalam hal ini, pengelola destinasi wisata bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan pariwisata, serta mengembangkan sistem mitigasi bencana sebagai upaya menghindari ketidaksesuaian ekspektasi dan meningkatkan persepsi wisatawan. Kegiatan mitigasi dilakukan dengan pelaksanaan penataan tata ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan, serta

penyelenggaraan pendidikan penyuluhan (Wulung & Abdullah, 2020).

Keselamatan dan keamanan wisatawan seringkali terancam menjadi sasaran kriminalitas karena dianggap memiliki uang yang banyak dan membawa barang berharga seperti kamera, handphone, jam tangan, perhiasan dan lainnya. Hal ini terlihat dari cara berpakaian dan kelakuan mereka yang mencolok berbeda dari penduduk lokal semakin memudahkan untuk dikenali.

Kawasan Dieng memiliki pesona berupa keunikan permukaannya yang seperti puncak gunung yang patah sehingga terdapat banyak kawah disana. Oleh karena itu, Dieng juga kerap disebut dengan dataran di atas pegunungan. Dilihat dari kondisi geomorfologinya, Dieng memiliki dataran yang terdiri dari wilayah-wilayah dengan struktur yang relatif horizontal dikenali oleh ciri dataran tinggi mempunyai relief yang tinggi dengan lembah lembah yang dalam. Faktor ketinggian Kawasan Dieng tersebut, menjadikannya ladang kentang yang sudah dimonopoli sejak lama karena sangat menjanjikan bagi perekonomian. Sekitar 90% lahan pertanian kentang mendominasi tanah di Dieng dengan pola tumpang sari. Bisnis yang menjanjikan tersebut kemudian membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga eksistensi dan keseimbangan ruang hijau di dataran tinggi berkurang.

Keterlibatan oknum-oknum pejabat melicinkan pengalihan lahan yang semula ditumbuhi pohon menjadi ladang yang ditanami kentang. Akibat yang kemudian dikhawatirkan adalah terjadi longsor saat musim hujan sebab Dieng telah menjadi gundul. Tentu hal ini merugikan dan mengancam keselamatan warga maupun wisatawan.

Pembangunan dan masyarakat merupakan unsur yang tak terpisahkan dalam segala proses perubahan kehidupan manusia. Masyarakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai objek pembangunan semata. Munculnya paradigma bottom-up planning yang menempatkan masyarakat dalam perannya sebagai subjek dan objek pembangunan. Implementasinya dalam pembangunan desa wisata, masyarakat lokal harus terlibat sejak awal sebagai objek sumber keberagaman atraksi. Kemudian, untuk menyempurnakan atraksi wisata, masyarakat setempat merancang Desa wisata Dieng. Pada proses ini, dapat terlihat peran aktif masyarakat Dieng untuk berpartisipasi dalam membangun tempat tinggal mereka menuju desa wisata yang sukses dan sejahtera.

Kawasan Dieng memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup karena kaya akan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti hutan dataran rendah dan pegunungan, dan potensi lainnya ditinjau

dari aspek ekologi, hidrologi, pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Sementara itu, masyarakat justru melakukan pembukaan lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian di wilayah Dieng. Selain karena paksaan ekonomi, pemerintah yang kurang perhatian terhadap pengelolaan hutan juga menjadi penyebab terbesarnya. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan lahan karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Dampak selanjutnya yaitu terjadi eksploitasi daerah konservasi, daerah hutan produksi yang dibiarkan terbengkalai, dan penyedotan tanpa pengelolaan air untuk kebutuhan pertanian mendatangkan masalah lain yakni bencana alam dan akhirnya menuju kearah pemiskinan bila dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak segera dihentikan, sumber air bagi penduduk Jawa Tengah akan terancam kering karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sekitar untuk langsung turun tangan menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat setempat tidak merasakan bencana dan dapat memperoleh kehidupan yang aman dan nyaman.

Dataran Tinggi Dieng memang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Dieng. Salah satu daya tarik wisatawan yang menyuguhkan kesakralan adat dan tradisi berupa beragam kesenian hingga upacara ritual pemotongan rambut gimbal sebagai puncak acara membuat jumlah wisatawan

yang mengunjungi Dieng Culture Festival terus meningkat setiap tahunnya. Atraksi dalam pariwisata memiliki definisi sebagai daya tarik yang merupakan aset wisata, dapat berupa ciptaan Tuhan, seperti keindahan alam, danau, gunung, hutan; karya manusia, seperti kesenian, adat istiadat, upacara tradisional; site attraction, seperti candi, keraton; dan event attraction, seperti Dieng Culture Festival ini (Isdarmanto, 2016). Tidak hanya menarik atensi wisatawan domestik/nusantara saja, acara ini juga ramai mendatangkan wisatawan mancanegara hingga menimbulkan kepadatan saat acara berlangsung.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat isu keselamatan dan keamanan berwisata mengindikasikan terjadinya kekurangan dalam pemenuhan standar yang krusial bagi pariwisata Indonesia (Rifai et al., 2020). Dapat ditelisik bahwasanya jaminan keselamatan dan keamanan dipersepsikan wisatawan merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi (Zebua, 2018). Temuan lain, persepsi atas keselamatan dan keamanan wisata oleh wisatawan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Junanto, 2020).

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini akan mendalami tata kelola dalam keselamatan dan keamanan destinasi wisata Dieng. Penelitian ini

menjadi penting untuk melengkapi studi terdahulu yang menemukan masih banyaknya kekurangan dalam aspek keselamatan dan keamanan wisata, sehingga penelitian serupa masih diperlukan untuk menghasilkan analisis yang lebih kaya. Terlebih, Dieng merupakan salah satu destinasi wisata yang populer dan ramai pengunjung. Kondisi tersebut memperkuat logika bahwa keselamatan dan keamanan wisata menjadi aspek yang perlu menjadi perhatian, terutama bagi pemerintah agar dapat mengelola pariwisata sebagai potensi daerah dengan maksimal.

Kejadian pada September 2022 silam memperlihatkan sebanyak 18 wisatawan Dieng Culture Festival terkena hipotermia (Nugraha, Bayu (2022)). Kejadian ini perlu menjadi perhatian agar kasus serupa tidak terulang lagi, mengingat Dieng merupakan salah satu destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Pentingnya tata kelola keselamatan dan keamanan wisata tidak hanya berlaku di Dieng, tetapi juga perlu diperhatikan pada destinasi wisata yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan, sesuai dengan urgensi masalah..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Menggunakan

pendekatan studi kasus. Dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan keadaan sebenarnya terkait jaminan keselamatan dan keamanan wisata yang direfleksikan dengan fasilitas dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata berdasarkan regulasi tata kelola di sektor pariwisata.

Pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian untuk menjabarkan dan memahami objek yang diteliti terhadap suatu kasus yang dilakukan secara khusus. Pendekatan studi kasus juga menjawab masalah dari suatu fenomena sosial secara komprehensif atau menyeluruh.

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan kebijakan, serta pokdarwis dan pengelola objek wisata Dieng yang dapat menjelaskan mengenai jaminan dan fasilitas keselamatan dan keamanan berwisata yang dialami.

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Sumber data primer berasal dari kumpulan informasi narasumber. Sementara, sumber data sekunder diperoleh dari sumber data yang relevan dan telah ada sebelum penelitian ini berlangsung.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan :

a. Observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi

dan interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, tempat diselenggarakannya Kawasan Wisata Dieng, serta mengamati ketersediaan fasilitas keselamatan dan keamanan berwisata. Ditambahkan dengan catatan berupa catatan fakta, teori, dan metodologis.

b. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber secara langsung.

c. Dokumentasi untuk menghimpun data sekunder berupa dokumen pendukung penelitian.

Menurut Noeng Muhadjir (1998), analisis data dapat dipahami sebagai pengolahan dan penataan informasi secara sistematis yang bertujuan untuk mencari makna dan menyajikannya sebagai sebuah temuan. Miles dan Huberman (1992) menjelaskan adanya tiga rangkaian utama dalam proses analisis yang dilakukan untuk mengolah data penelitian kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjabaran rangkaian tersebut dapat dijabarkan secara lebih lanjut sebagai berikut:

1. Reduksi Data merupakan sebuah usaha untuk memilah data ke dalam konsep, kategori, dan tema tertentu. Proses transformasi terus menerus ini dapat memperlihatkan pengerucutan data sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Lebih sempit, reduksi data meliputi meringkas

data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus.

2. Penyajian Data adalah kegiatan menyusun sekumpulan informasi, baik berupa teks naratif, maupun matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dilakukan secara bertahap oleh peneliti untuk menemukan arti, mencatat pola, memperoleh penjelasan, konfigurasi, sebab-akibat, dan preposisi (Rijali, 2019)

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian di atas, tata kelola keselamatan dan keamanan pada sektor Wisata Dieng telah memenuhi enam hal dalam pengembangan proses perencanaan manajemen risiko menurut The Workers' Compensation Board (WCB) of British Columbia (WCB) (2002), dalam mendefinisikan "Health and Safety Program". Pemetaan risiko keselamatan dan keamanan pada sektor pariwisata Dieng dan manajemen risiko tersebut oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, pengelola usaha wisata, dan Pokdarwis dapat diketahui adanya perbedaan penanganan terhadap risiko keselamatan dan keamanan tetapi tetap berpedoman pada hierarki peraturan yang ada. Mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata, SK Bupati dalam Surat Edaran oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, hingga tata tertib objek wisata dan ketentuan-ketentuan festival.

Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan telah menjamin keselamatan dan keamanan pada sektor pariwisata melalui produk yuridis terkait perlindungan hukum yang ada. Perencanaan, Pengesahan, dan pelaksanaan regulasi juga telah dilaksanakan guna menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum. Dibukanya website resmi dan media sosial sebagai wadah untuk menyediakan informasi kepariwisataan, serta keamanan dan keselamatan kepada calon wisatawan. Pemasangan himbauan, larangan, papan informasi, dan tata tertib di setiap objek wisata sebagai upaya menguatkan kesadaran wisatawan akan risiko keselamatan dan keamanan supaya dapat menjadi perhatian. Melakukan revitalisasi kawasan wisata Dieng demi memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. Melaksanakan standarisasi dan inventarisasi untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan

dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Informasi yang akurat mengenai Wisata Dieng telah tersedia di berbagai portal internet, sosial media, dan media cetak. Hal ini dapat diwujudkan atas kerjasama pengelola dengan media mengingat pentingnya pemahaman mengenai suatu objek wisata bagi wisatawan. Penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan sesuai standar telah dilakukan, mulai dari fasilitas hingga jaminan keselamatan dan keamanan. Penyediaan SOP K3 di setiap objek Wisata Dieng telah dipenuhi guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Himbauan dan peringatan bagi wisatawan telah dipasang di loket dan titik-titik strategis untuk menumbuhkan kesadaran waspada atas barang pribadi dan barang berharga yang dibawa. Terdapat jaminan asuransi yang termasuk dalam tiket masuk objek wisata sehingga wisatawan dapat merasa aman dan terlindungi meskipun mengunjungi wisata yang berisiko tinggi. Selain itu, disediakan pula akses dan layanan kepada wisatawan dengan keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tata kelola keselamatan dan keamanan yang Tangguh pada sektor pariwisata, dibutuhkan pemenuhan terhadap kualitas standar kompetensi

sumber daya manusia. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menggandeng para profesional untuk melaksanakan pelatihan, pembinaan, standarisasi, dan sertifikasi terhadap tenaga kerja dan pemilik usaha wisata diantaranya pelatihan dan standarisasi tour guide bagi jasa perorangan dan/atau biro perjalanan wisata yang berada di sekitar objek wisata Dieng, pembinaan dan pelatihan life guard pengusaha dan pengelola wisata tirta, pembinaan dan pelatihan mitigasi bencana, pembinaan dan standarisasi manajemen pemilik usaha hotel, homestay, restoran, dan sebagainya yang berada di sekitar objek wisata Dieng, pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang-pedangang UMKM, pemenuhan standar kompetensi dan sertifikasi terhadap sumber daya manusia yang bergerak dalam industry pariwisata Dieng, pembinaan kepada pengelola lahan parkir dan jasa transportasi, sertifikasi dan inventaris biro penyedia jasa perjalanan wisata dan agen travel, pembinaan dan pelatihan pokdarwis, serta pelatihan tenaga kewanmanan desa dan objek wisata

Wisatawan yang mengunjungi objek Wisata Dieng akan menemukan aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat mawas diri dan menghindari hal-hal yang dilarang demi keselamatan dan keamanan. Petugas di lingkup objek wisata telah menerima dan memahami SOP yang dibuat oleh Dinas terkait sehingga dapat

menjalankan kegiatan kepariwisataan dan menjelaskan jaminan keselamatan dan keamanan sesuai standar kepada wisatawan. Hal ini termasuk dengan menyediakan sistem dokumentasi/arsip keselamatan pengunjung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara selaku pengelola telah mengalokasikan dana untuk menggunakan asuransi Jasa Raharja Putera untuk jaminan keselamatan, keamanan, dan kesehatan wisatawan. Informasi dan prosedur klaim dapat diperoleh dengan menghubungi nomor darurat di 082323690676 atau dapat mengirim pengaduan melalui akun Instagram @uptd_wisata_dieng dan email uptddieng@gmail.com. Pengelola juga memastikan efektivitas mitigasi bencana untuk bertanggung jawab memberikan pertolongan saat terjadi bencana. Informasi mengenai mitigasi bencana untuk para wisatawan dapat diakses dengan memantau aktivitas gunung api melalui magma.esdm.go.id. Selanjutnya, wisatawan dihimbau untuk tidak terlalu lama berada di wisata berisiko tinggi seperti kawah dan wajib memakai masker. Berkaitan dengan kesehatan, P3K, obat-obatan, kursi roda, drag bar, dan pertolongan pertama lainnya sudah tersedia di setiap objek wisata. Lebih lanjut, fasilitas puskesmas dan tenaga kesehatan disana siap membantu wisatawan yang terluka,

kelelahan, hipotermia, pusing, pingsan, dan keluhan kesehatan lainnya.

Setiap objek Wisata Dieng telah melengkapi sarana dan prasarana umum bagi kenyamanan wisata seperti fasilitas toilet dan sanitasi, tempat ibadah, tempat duduk, spot foto terbaik, kios pedagang UMKM, akses dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, tempat makan, dan yang lainnya. Selain itu, Pemerintah Daerah kini sedang dalam proses memperbaiki infrastruktur bersamaan dengan revitalisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR agar memudahkan aksesibilitas wisatawan menuju lokasi objek Wisata Dieng dengan memberikan panduan rute terbaik dan penunjuk arah di sepanjang rute tersebut. Pengelola juga melaksanakan rencana kerja untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pada sektor pariwisata dengan melakukan evaluasi dan perbaikan SOP supaya selalu terbaru.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara telah menjamin keselamatan dan keamanan pada sektor pariwisata Dieng dengan menggunakan produk yuridis terkait perlindungan hukum. Pemerintah Daerah telah mengelola dan mengawasi regulasi yang berlaku untuk menciptakan

iklim yang kondusif bagi usaha pariwisata dan telah memenuhi aspek-aspek dalam pengembangan proses perencanaan manajemen risiko. Setiap objek Wisata Dieng telah melengkapi sarana dan prasarana umum bagi kenyamanan wisata seperti fasilitas toilet dan sanitasi, tempat ibadah, tempat duduk, spot foto terbaik, kios pedagang UMKM, akses dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah menggandeng berbagai pihak dalam tata kelola untuk menjamin keselamatan dan keamanan pariwisata Dieng. Pemenuhan kualitas standar kompetensi SDM turut ditegaskan. Dari sisi pengelola, mereka mengawasi efektivitas mitigasi bencana untuk memberikan pertolongan saat terjadi bencana. SOP K3 diberlakukan dalam rangka memberikan edukasi terkait berbagai himbauan kepada wisatawan terkait potensi bahaya yang ada dalam kawasan wisata. Fasilitas puskesmas dan tenaga kesehatan dikerahkan untuk membantu wisatawan yang terluka, kelelahan, hipotermia, pusing, pingsan, dan keluhan kesehatan lainnya. Sebagai upaya kuratif, pemerintah dan pengelola telah menganggarkan dana asuransi ketika terjadi kecelakaan di Kawasan wisata

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keselamatan dan keamanan pada sektor

pariwisata Dieng antara lain; (1) Mempertahankan dan meningkatkan mutu SDM pengelola dan stakeholder untuk menjamin keselamatan dan keamanan wisata (2) Melakukan pengecekan rutin terhadap sarana pra sarana yang digunakan serta memerhatikan umur pakai agar meminimalisir risiko kecelakaan di tempat wisata (3) Melakukan evaluasi dan pembaruan SOP secara berkala untuk memastikan relevansi dengan kondisi terkini yang ada di kawasan wisata.

Dari sisi akademik, peneliti mendukung penguatan kajian teoritis melalui penelitian lanjutan yang dilakukan setelah adanya revitalisasi Wisata Dieng dengan menggunakan penelitian ini sebagai salah satu referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Canadian Tourism Commission], (2003) Risk Management Guide for Tourism Operator. Ottawa.
- Dr. Ir. Suprpto. M. Eng. (2016). Diklat Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi Tingkat Dasar. Modul Manajemen Risiko, 46. Retrieved from https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/12/94bcb_Modul_Manajemen_Resiko.pdf
- Gunawan, M. P. (2003). Pedoman Keselamatan Wisatawan.
- Hanafi, M. (2015). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. *Managemen*, 1(1), 66. Retrieved from

- <http://repository.ut.ac.id/4533/1/EK-MA4116-M1.pdf>
- Isdarmanto. (2016). *Dasar Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Perpus.Univpancasila.Ac.Id. Retrieved from <http://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EBUPT190173.pdf>
- Jones, GR. (2002). *Contemporary Management*, 2nd edition. McGrawHill Co.,USA.
- Laheri, P. E. (2015). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p10>
- Listiana, Maryani, E., Somantri, L., & Setiawan, I. (2023). Analisis Risiko Bencana Pada Lokasi Wisata Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*, 7(1), 29–46. <https://doi.org/10.22236/jgel.v7i1.10322>
- Maesaroh, M., & Suwarno, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Bencana Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 6, 92–98. <https://doi.org/10.30595/pssh.v6i.447>
- Masrurun, Zam Zam; Nastiti, D. M. (2021). Pola Perjalanan Wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. *Journal of Tourism and Creativity*, 5(1), 28–34. <https://doi.org/10.22141/2224-0721.16.4.2020.208486>
- Prastowo, I. (2022). Pelatihan Keamanan Dan Keselamatan Di Destinasi Wisata Sesuai Standar Nasional Maupun Internasional Bagi Pengelola Pariwisata Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pengabdian Teknologi Tepat Guna*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.47942/jpttg.v3i1.829>
- Raharjana, D. T., Yusuf, M., & Retnowati, A. (2020). Penguatan Kapasitas Pokdarwis untuk Pengurangan Risiko Bencana di Destinasi Pariwisata Dieng. *Bakti Budaya*, 3(2), 132. <https://doi.org/10.22146/bb.60957>
- Riley, E. (2007). The Multidimensional of Tourist Safety and Security Panel Discussion: A Disaster Management Perspective, Regional Policy Dialogue on Tourism Safety and Security. *The Cascadia Hotel and Conference Centre St Ann's. Trinidad and Tobago*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rizkayana, R., Adys, A. K., & Taufik, A. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 180–190. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i2.51>

- Salim, A. (2005). Asuransi dan Manajemen Risiko, hal. 4, Raja Grafindo Persada
- Sanjaya, I. M. R. S. (2017). Upaya Peningkatan Sektor Keamanan dan Keselamatan Dalam Mewujudkan Pariwisata Damai di Bali, 1–24.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2007). Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan. Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal, 189–232.
- Suardi, R. (2007). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PPM, Cetakan kedua, Jakarta.
- Suharto. (2016). Studi Tentang Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo), 14, 287–304.
- Suseno, P. (2014). Konsep Dasar Manajemen Risiko. Modul, 1–50.
- Wulung, S. R. P., & Abdullah, C. U. (2020). Upaya Mitigasi Pasca Tsunami Di Destinasi Pariwisata. *Media Bina Ilmiah*, 14(7), 2883–2894.
- Yudistira, I. G. A. A., Nur, D., & Susanto, A. (2012). Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(29), 19–24.
- Yuliani, L., Kastolani, W., & Rahmafitria, F. (2018). Analisis Persepsi Wisatawan Nusantara Dan Wisatawan Mancanegara Mengenai Mitigasi Bencana Dan Minat Berkunjung Di Twa Gunung Tangkuban Parahu. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 1(1), 58–68. <https://doi.org/10.17509/jithor.v1i1.13288>